

**PENANGANAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN**
(HASIL PENELITIAN STRATEGIS STPN)
2013



PPPM -STPN

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)
Tim Peneliti STPN
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013
oleh: Tim Peneliti STPN -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2014
287 hlm; 160x240 mm

ISBN: 602789410-5

**Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
(Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013**

Penulis: Tim Peneliti STPN
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hesting Puri
Desain Isi & Cover: Aksarabumi Jogjakarta

Cetakan Pertama, Desember 2013

Penerbit:



**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi Nomor 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telp: 0274-587239
email: pppm_stpn@yahoo.com
website: http://pppm.stpn.ac.id

Hak Cipta © 2013 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | 5 |
| Pengantar Penyunting | 7 |
| | |
| Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali | |
| IG Nyoman Guntur, Yahman, dan Widhiana H Puri | 9 |
| | |
| “Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan”: Dinamika Konflik Agraria di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | |
| Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong | 41 |
| | |
| ‘Dari Mangkuk Menjadi Piring’ (Studi Tata Kuasa Sumber Daya Agraria di Sekitar Danau Rawa Pening) | |
| Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M. Nazir Salim | 81 |
| | |
| Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah) | |
| Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto ... | 131 |
| | |
| Intervensi <i>Stakeholder</i> dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah | |
| Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, dan Panjang Suharto ... | 145 |

Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani

(Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)

Oleh:

Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto

A. Pendahuluan

Sebagaimana wilayah lainnya, Kabupaten Blora memiliki beberapa kelompok tani yang diorganisir oleh petani di tingkat desa. Kelompok tani dari beberapa desa selanjutnya mengorganisir diri dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di tingkat kecamatan. Organisasi petani ini berupaya memperjuangkan kepentingan mendasar petani, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian para anggotanya, dan berinteraksi dengan institusi yang berkehendak membantu atau memberdayakan petani. Dalam konteks pertanahan dan berdasarkan kegiatan kelompok tani, maka terbuka peluang sinergi (*synergy*) antara kelompok tani dengan kantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani?”

Sebagaimana diketahui K.J. Veeger (1990) menyatakan, bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri, dan beralamat sendiri. Untuk lebih mengetahui konsepsi individu pada masyarakat perlu kiranya diperhatikan pendapat

John Dewey (1859-1952), yang mengungkapkan filsafat instrumentalisme. Filsafat ini menolak pemisahan antara teori (hasil pengamatan terhadap praktek) dengan praktek. Filsafat ini juga menolak anggapan adanya *value free science* (ilmu atau sains bebas nilai). Penolakan ini didasari pada kekhawatiran, bahwa sains semacam ini akan melucuti pengetahuan manusia dari ciri kemanusiaannya yaitu nilai-nilai kemanusiaan, meskipun diketahui bahwa *value free science* sendiri menolak anggapan bahwa pikiran manusia merupakan cerminan dari luar.

Menurut K.J. Veeger, manusia tidak secara pasif menerima saja pengetahuannya dari luar, tetapi secara aktif dan dinamis membentuk sendiri pengetahuan (pemikiran) dan perilakunya. Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminir (membatasi) dia, tetapi merupakan kondisi yang menjadi dasar bagi penentuan sikapnya. Dalam tataran teori tindakan diketahui, bahwa pemikiran John Dewey yang menggarisbawahi kesatuan antara berpikir dengan bertindak, telah mempengaruhi George Herbert Mead (1963-1931), sehingga dapat “melihat” bahwa pikiran (*mind*) dan kedirian (*self*) merupakan dasar dari perilaku manusia, khususnya ketika berinteraksi dengan orang lain.

David Jary dan Julia Jary menjelaskan bahwa Mead dipengaruhi oleh John Dewey dan Charles Horton Cooley. Sedangkan K.J. Veeger menyatakan bahwa Mead menaruh perhatian pada upaya manusia mengenakan arti pada dunianya. Sementara itu, Nicholas Abercrombie dan kawan-kawan menyatakan bahwa Mead menaruh perhatian pada kehidupan sosial, yang menurut Mead ditentukan oleh kemampuan manusia membayangkan dirinya pada peran sosial orang lain, dan kemampuan manusia yang bersangkutan berdiskusi secara internal dengan dirinya sendiri. Akhirnya Herbert Blumer (dalam Poloma, 1994:261) berhasil memahami konsepsi yang ada pada pemikiran Mead, dan mengemasnya dalam teori sosiologi yang disebut Teori Interaksionisme Simbolik. Teori ini menyatakan, bahwa: Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain dan disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Dengan memanfaatkan Teori Interaksionisme Simbolik, sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani dapat diamati dalam beberapa segmen, sebagai berikut: Pertama, makna sinergi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. Kedua, proses pembentukan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. Ketiga, interaksi antara Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. Keempat, proses penyempurnaan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.

Ketika saling menyempurnakan makna, maka akan terbuka peluang terjadinya benturan antara hukum negara (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan hukum lokal (berdasarkan tradisi, norma, dan ketentuan setempat). Tentang hal ini Julius Sembiring (2012:83) menjelaskan, bahwa ketika hukum negara berbenturan dengan hukum lokal, maka akan terjadi dinamika eksternal hukum. Sementara itu, ketika terjadi benturan antar berbagai aturan sektoral, maka akan terjadi dinamika internal hukum. Dengan demikian sebagai sebuah konsepsi sosial, maka hukum bersifat dinamis, sehingga penyempurnaan makna suatu konsep layak dilakukan secara terus menerus.

Interaksi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora, juga dapat didekati dengan mengamati pertemuan keduanya pada simpul agribisnis, meskipun dalam ukuran yang relatif kecil. Konsep agribisnis memanfaatkan teknologi yang bercirikan, mampu: (1) meningkatkan efisiensi dan *cost effectiveness* produksi melalui teknologi inovatif, (2) menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk, (3) menghasilkan produk primer berkualitas tinggi dengan standar harga pasar yang baik, (4) mengurangi kehilangan hasil pada saat pra panen dan pasca panen, (5) mengolah *by-product* menjadi produk bernilai tambah, (6) mempertahankan produktivitas dan kualitas produksi, serta suplai produk ke pasar secara berkesinambungan, dan (7) mampu memperbaiki kualitas kemasan untuk transportasi (lihat Budianto, 2002).

Ketika sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani di Kabupaten Blora sedang dilakukan, maka perhatian terutama harus ditujukan pada upaya mensejahterakan petani miskin. Ashley dan Carney (1999) menjelaskan, bahwa petani miskin di pedesaan mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk meningkatkan pendapatannya, di mana hal ini tergantung pada keadaan sistem pertanian yang berkembang di wilayahnya. Oleh karena itu, Berdeque dan Escobar (2002) menyatakan, bahwa program yang disusun untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan harus didasarkan potensi sumber daya di masing-masing lokasi, dengan melihat hubungan langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

Dengan demikian sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora dapat menjangkau kesejahteraan petani dengan tetap mempertimbangkan ekosistem. Hal ini akan mendukung tercapainya suatu sistem usaha tani produktif yang berkelanjutan, yang bercirikan penggunaan input luar yang rendah. Sistem usaha tani ini juga sejalan dengan konsep diversifikasi horizontal dalam upaya peningkatan pendapatan rumah tangga tani, yaitu mengembangkan komoditas unggulan sebagai *core of business*, serta mengembangkan usaha tani komoditas lainnya sebagai penyangga. Semua ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga, serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha (Lihat Sarjana, 2001). Diversifikasi usaha tani tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sehingga tidak terjadi degradasi tanah (lihat Orgendo, 1998). Hal ini penting, karena menurut Rusdi (2012:58), bagi seorang petani, tanah merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena tanah dapat digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Padmo (2000:20) menyatakan, bahwa sawah bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga memberi kesempatan pada pemiliknya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan di desa.

Arifin (2012:208) menambahkan, bahwa wacana pemikiran yang berkembang dalam kehidupan keluarga petani di desa, tercermin dalam dialog sehari-hari mereka, tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam hidup ini ada keadaan tertentu di mana manusia harus tunduk serta patuh pada lingkungan alam sekitarnya, dan dalam kondisi tertentu harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya.

Pada penelitian “Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)” ini, peneliti menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik. Secara keseluruhan ada 11 (sebelas) orang informan dalam penelitian ini, walaupun secara metodologis (kualitatif) jumlah informan tidaklah ditentukan secara rigid, karena bersifat situasional dan kondisional. Informan dipilih dengan teknik penjarangan informan yang dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara kualitatif.

B. Makna Sinergi Bagi Para Pihak

Banyak pihak yang memberi makna sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Makna (*mean*) adalah arti dari suatu kata, tanda, atau tindakan yang berhasil ditangkap, difahami atau dimengerti oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Masing-masing pihak memberi makna atas sinergi tersebut berdasarkan persepsi, yang dikaitkan dengan kontribusi masing-masing dalam sinergi tersebut, yang antara lain sebagai berikut: Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Sinergi mewujudkan dalam pelaksanaan SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) di Desa Sendangharjo, yang merupakan bentuk kerjasama antara Kantor

Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, dengan memberi jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh petani. Tokoh penting di balik kerjasama ini adalah Sri Suharyanto, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sendangharjo. Sri Suharyanto memainkan peran penting, ketika membentuk panitia desa dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo.

Kedua, Pemerintah Desa Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Berkaitan dengan hal ini, Sri Suharyanto (Kepala Desa Sendangharjo) menjelaskan, bahwa masyarakat Desa Sendangharjo senang dengan adanya SMS, karena sertipikatnya akan digunakan untuk mendapatkan kredit di bank untuk modal usaha perdagangan ataupun pertanian.

Ketiga, Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Berkaitan dengan hal ini, Wiwik Suhendro menyatakan, bahwa SMS berguna buat petani, karena berarti tanahnya sudah aman, karena tanah itu harta petani satu-satunya. Ia juga menambahkan, bahwa petani juga bisa dapat kredit dari bank dengan menjadikan tanahnya yang telah bersertipikat sebagai jaminan, yang nantinya kredit tersebut digunakan untuk membeli kambing. Sebagaimana diketahui Wiwik Suhendro adalah Kepala Dukuh Pilangrejo, Desa Sendangharjo. Ia juga merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani "Sidorahayu", yang diberi amanat sebagai Sekretaris Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo.

Keempat, Kelompok Tani memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan petani Desa Sendangharjo. Sebagaimana diketahui pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo diperuntukkan bagi anggota Kelompok Tani yang ada di Desa Sendangharjo, yang terdiri dari: (1) Kelompok Tani "Tirta Mukti" di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani "Tirta Jaya" di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani "Tirta Makmur" di

Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani "Sido Makmur" di Dukuh Kedawung, serta (5) Kelompok Tani "Sidorahayu" dan Kelompok Tani "Sidorukun" di Dukuh Pilangrejo.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Blora memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pentingnya SMS ditandai oleh kesediaan Bupati Blora untuk menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah yang diproses melalui pelaksanaan SMS pada tanggal 14 Mei 2013. Walaupun kemudian, karena ada tugas lain yang tak dapat ditinggalkan, Bupati Blora gagal melaksanakan kesediaannya itu.

Keenam, petani Desa Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Makna ini nampak dalam penjelasan Rochim (petani Dukuh Pilangrejo) yang berpartisipasi dalam kegiatan SMS, sebagai berikut: Ia mengerti bahwa kegiatan SMS ini bermanfaat buat petani. Pada awalnya ia percaya tentang manfaat pelaksanaan SMS, karena disampaikan oleh orang yang ia percaya, yaitu Wiwik Suhendro yang merupakan Ketua Kelompok Tani "Sidorahayu", di mana Rochim adalah anggotanya. Rochim berharap agar sertipikat hak atas tanah atas nama istrinya ini dapat cepat selesai, karena ia akan mengambil kredit di bank untuk membeli kambing.

C. Interaksi Dalam Sinergi

Ada beberapa pihak yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, yang kemudian "dibaca" sebagai sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani. Beberapa pihak yang saling berinteraksi ini selanjutnya mengubah makna sinergi yang sebelumnya telah dibangun. Tepatnya, sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, yang telah dimaknai oleh para pihak, kemudian disempurnakan maknanya seiring dengan berlangsungnya interaksi mereka. Makna dibangun sebagai persepsi atas sinergi tersebut dalam

konteks kontribusi masing-masing pihak, sebagai berikut: Pertama, pada awalnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dimaknai, sebagai suatu keharusan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, untuk bertindak (berkegiatan) memberdayakan masyarakat termasuk petani.

Kedua, pada awalnya Pemerintah Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Pemerintah Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk tanggung-jawab Pemerintah Desa Sendangharjo dalam membantu masyarakat, terutama petani di desa ini.

Dalam membantu masyarakat, jajaran Pemerintah Desa Sendangharjo diperkuat oleh perangkat desa yang berjumlah 13 orang, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (sebanyak lima orang), kepala dukuh (sebanyak empat orang), serta modin (kepala urusan agama Islam) dan kebayan (kepala urusan sosial) yang masing-masing berjumlah satu orang. Sementara itu, Kepala Desa Sendangharjo bertugas: (1) menyelenggarakan pemerintahan desa, (2) membina kehidupan masyarakat, (3) membina perekonomian desa, (4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (5) mendamaikan perselisihan masyarakat, (6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, (7) mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) menetapkan peraturan desa, dan (8) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di desa.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Sendangharjo untuk menyebut jabatan tertentu perangkat desa, misal: (1) sekretaris desa biasa disebut "*carik*", yang tugasnya menyelenggarakan administrasi desa, dan memberikan pelayanan

administrasi desa; (2) kepala dukuh biasa disebut "*kamituwo*", yang tugasnya membantu kepala desa di wilayah dukuhnya; (3) *kebayan* yang bertugas melaksanakan kegiatan sosial di wilayah dukuh yang menjadi tanggung-jawabnya. Selain itu juga ada kepala urusan yang bertugas menyelenggarakan administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penghargaan atas kinerjanya, perangkat desa memperoleh tanah bengkok yang luasnya bervariasi, dari yang paling rendah yaitu yang dikelola oleh Sutrisno (Kebayan) seluas 0,5 Ha, sampai yang paling tinggi yaitu yang dikelola oleh Sri Suharyanto (Kepala Desa Sendangharjo) seluas 8,81 Ha. Khusus bagi Sekretaris Desa Sendangharjo, karena sudah pegawai negeri tidak dapat bengkok. Sementara itu para kepala urusan bengkoknya bervariasi antara 1,07 ha-1,92 Ha. Sedangkan kepala dukuh bengkoknya bervariasi antara 2,36 Ha-2,82 Ha.

Ketiga, pada awalnya Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dalam membantu masyarakat, terutama petani di desa ini.

Keempat, pada awalnya kelompok tani memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh kelompok tani dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar kelompok tani bagi tercapainya kepentingan kelompok tani, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani yang menjadi anggotanya.

Ketika pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo melibatkan kelompok tani, sehingga kelompok tani dapat berkontribusi bagi ikhtiar memberi jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah yang dimiliki petani, maka hal berbeda terjadi di Desa Mojorembun. Djauhari (Sekretaris Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan,

Kabupaten Blora) menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Mojorembun didanai dan dikelola oleh PT. Multi Artha dengan biaya per bidang bervariasi antara Rp. 1-2 juta. Setelah sertipikat hak atas tanah terbit warga membayar biaya sertifikasi ke PT. Multi Artha dengan cara mengangsur sebanyak 12 kali dengan bunga flat. Peserta SMS sebanyak 117 bidang tanah, yang pada awalnya dilakukan sosialisasi kepada warga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Pemerintah Desa Mojorembun, dan PT. Multi Artha.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Mojorembun membentuk Panitia Desa yang terdiri dari: (1) Ketua: Kepala Desa Mojorembun; (2) Sekretaris: Sekretaris Desa Mojorembun; dan (3) Anggota: empat orang kepala dukuh. Sementara itu, peserta kegiatan SMS adalah warga Desa Mojorembun, dengan tidak memperdulikan anggota kelompok tani atau bukan anggota kelompok tani. Pada Juni 2011, warga desa yang tertarik untuk ikut-serta dalam kegiatan SMS mendaftarkan diri. Seluruh peserta SMS ini kemudian disortir oleh Panitia Desa, hingga lolos 117 bidang tanah. Pembuatan akta dilakukan oleh PT. Multi Artha dengan berkoordinasi dengan Camat Kradenan, tetapi aktaanya dibuat PPAT (Notaris) yang ditunjuk oleh PT. Multi Artha.

Pada Nopember 2011, berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan oleh PT. Multi Artha. Kemudian, pada Desember 2011 dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Saat pengukuran petugas ukur didampingi oleh kepala dukuh setempat sebagai anggota Panitia Desa, sedangkan penunjukan batas dilakukan oleh pemilik tanah dengan disaksikan tetangga yang bersebelahan. Tetapi, karena ada perbedaan luas hasil ukur dengan luas yang tercantum di akta, maka dilakukan *renvoi* oleh PPAT (Notaris) yang bersangkutan.

Sertipikat hak atas tanah telah terbit dan telah diserahkan pada warga peserta SMS pada Juni 2012. Pendanaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan SMS oleh PT. Multi Artha dianggap berhasil oleh masyarakat, bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana sertifikasi tanah didanai oleh BKK (Badan Kredit Kecamatan) Blora, tetapi setiap empat bulan ada pembaruan administrasi, sehingga merepotkan warga. Sebagaimana diketahui,

usaha tani yang dominan di Desa Mojorembun adalah padi dan palawija (jagung). Meskipun begitu, di desa ini juga ada tembakau, semangka, melon, *lombok* (cabai). Segenap komoditi pertanian ini dikelola oleh para petani yang diorganisir oleh 7 kelompok tani yang ada di Desa Mojorembun. Sementara itu, berkaitan dengan bidang tanah, diketahui bahwa di Desa Mojorembun terdapat 2.322 bidang tanah.

Kelima, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Blora memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Blora dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yang sesungguhnya juga masuk dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Blora.

Keenam, pada awalnya petani Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh petani Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar petani Desa Sendangharjo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kesejahteraan.

D. Penutup

Sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, nampak dalam pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Kegiatan ini terselenggara atas peran yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Desa Sendangharjo. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan adanya peran pendukung yang dijalankan oleh pihak-pihak lain yang terkait, seperti Pemerintah Desa Sendangharjo, Panitia Desa Untuk Pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, Pemerintah Kabupaten Blora, dan petani Desa Sendangharjo. Pada awalnya

pihak-pihak ini memiliki makna bahwa sinergi yang terjadi merupakan bentuk kewajiban semata. Namun seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak, ternyata pihak-pihak ini melakukan penyempurnaan makna, sehingga sinergi justru dimaknai sebagai kepentingan para pihak untuk memberdayakan petani.

Daftar Pustaka

- Arifin. 2012. *Ketika Masyarakat Desa Berubah: Perspektif Teoritis Dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ashley, C. and Carney, D. 1999. *Sustainable Livelihood: Lesson from Corley Experience*. London: DFID.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2012. *Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah: Kabupaten Blora Tahun 2012*. Blora: Pemerintah Kabupaten Blora.
- Berdeque, J.A., and Escobar. 2002. "Rural Deversity, Agricultural, Innovation Policies And Poverty Reduction." Agricultural Research and Extension Network.
- BP DAS Jeneberang Walane. 2008. "Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan."
- Budianto, J. 2002. *Tantangan Dan Peluang Penelitian Dan Pengembangan Padi Dalam Perspektif Agribisnis*. Bogor: Pusat Penelitian Dan pengembangan Tanaman Pangan.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. *Collins: Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collins Publishers.
- Kartasasmita, G. 1996. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Orgendo, O. 1998. "Tenure Regime And Land Use System In Africa: The Challengers At Sustainability." Nairobi: Departemen Of Law, University Of Nairobi, Kenya.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform Dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959– 1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Rusdi. 2012. *Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan Dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sarjana, Joko P., E. Iriani, M.Norma, dan A. Sutanto. 2001. "KSP Rawa Pening." Semarang: BPTP Jawa Tengah.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprpto, Prasetyo, T. dan Setyani, C. 2006. "Embung Sebagai Alternatif Mencukupi Kebutuhan Air Untuk Usahatani di Kabupaten Blora." Jakarta: Badan Litbang Pertanian.
- Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)." Cambridge: Cambridge University Press.